



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 16 DESEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Alamsyah Panggabean

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 16 Desember 2020, Pukul 10.43 – 10.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra            | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Alamsyah Panggabean

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Alamsyah kita mulai, ya.

**2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pak Alamsyah, meskipun kami sudah kenal Bapak, Bapak sudah kenal kami, ini karena ketentuan hukum acara, Bapak tetap diwajibkan memperkenalkan diri. Silakan!

**4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam.

**6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Perkenalkanlah saya ini atas nama Alamsyah Panggabean, alamat Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, di sidang sebelumnya kami sudah menyampaikan beberapa saran-saran, catatan untuk Bapak hari ini sidang Perbaikan Permohonan, Pendahuluan Perbaikan Permohonan. Silakan, Bapak sampaikan pokok-pokok apa saja yang Bapak perbaiki terkait dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Panel pada sidang sebelumnya. Silakan, Pak, pokok-pokoknya saja!

## **8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Terhormat Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan perbaikan permohonan Nomor Perkara 98/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai Mahkamah.

I. Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan.

## **9. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, lanjut.

## **10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak ikut serta sebagai anggota untuk menyelenggarakan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ketidakikutsertaan Pemohon dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya tersebut dapat menimbulkan suatu bentuk diskriminasi dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bahwa hak Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri melalui pemenuhan hak asasi manusia menjadi terhalang dengan berlakunya frasa *secara kolektif* yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Alasan Permohonan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah pengejawantahan dari Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan pemerintahan itu cuma ada satu, yaitu pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dikuatkan oleh Bab XA Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah pengejawantahan dari Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan pelaksanaan hak asasi manusia itu dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sepanjang frasa *secara pribadi* adalah mengikat secara umum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden. Dan pengaturan tersebut sejalan dengan penjelasan umum, paragraf 12, serta dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Alamsyah, halo, Pak Alamsyah? Itu yang baru yang diperbaiki, Pak, jangan dibacakan semua bagiannya sudah ada juga di Permohonan sebelumnya. Jadi, Bapak sampaikan mana yang baru yang berubah, itu saja, Pak.

**12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia.

Dengan demikian, maka frasa *secara pribadi* yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah konstitusional. Dengan ... bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (1). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sepanjang frasa *secara pribadi* tersebut inkonstitusional dan telah memberikan hak kepada Pemohon untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa secara pribadi tersebut harus diartikan sebagai peraturan pemerintah dan untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan Pemohon sebagai anggota dalam pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Petitum

Maka sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ucapan tidak terdengar dengan jelas) 2 Desember 2020. Hormat saya Pemohon Alamsyah Panggabean ditanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Alamsyah. Jadi pada intinya ini beberapa perbaikan, ya, Pak Alamsyah itu merasa dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang HAM itu Pak Alamsyah, ya?

**14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Karena itu dianggap ... apa namanya ... bertentangan dengan kesempatan Bapak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Begitu, ya?

**16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Karena Bapak ingin diangkat menjadi anggota DPRD, begitu ya?

**18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Sebagaimana baiknya, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Bagaimana baiknya lah begitu, ya?

**22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang mau ditambahkan yang lain, Pak Alamsyah, atau cukup?

**24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Alamsyah.

**27. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Panggilnya Pak Alam, ya?

**29. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu kalau besok lagi Pak Alam itu kalau menyampaikan secara lisan enggak usah lagi disebutkan koma, titik, titik dua itu tidak usah disebutkan, Pak. Nanti kalau Bapak pidato begitu bingung orang nanti, Pak, ya. Langsung saja tidak usah tanda baca tidak perlu disebutkan, ya.

Kemudian, yang ini Petitumnya memang begini, Pak, bunyinya petitumnya? Petitumnya bunyinya memang begitu? Sepanjang frasa itu? Betul Petitumnya itu?

**31. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Kalau yang pokok ... kalau dari Permohonan yang fisiknya (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak, ini yang sudah diperbaiki angka 2 itu lho memang begitu bunyi Petitumnya, ya? Jadi sepanjang frasa dan seterusnya itu, ya?

**33. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi Pasal 15 sepanjang frasa ini yang dinyatakan bertentangan begitu?

**35. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, berarti yang tidak bertentangan apa berarti sisanya?

**37. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Secara pribadi, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, secara pribadi tidak bertentangan?

**39. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Tidak bertentangan, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, tapi Anda membacanya bagaimana kemudian Pasal 15-nya?

**41. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Di pokok ... di persidangan ini secara kolektif saja, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sudahlah kalau begitu, ya. Ini sudah dinasihatkan kemarin, ya. Baik, terima kasih.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Yang Mulia Pak (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya mau ... melalui Pak Ketua, ya. Saya hanya menegaskan dulu ini, Pak Alamsyah.

**45. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Memang pasal ini menurut Pak Alamsyah menghalangi Pak Alamsyah untuk memperoleh tujuan, yaitu untuk diangkat sebagai anggota DPRD atau memang karena tidak digunakan pasal ini sehingga menurut Bapak enggak perlu ada pasal ini? Di mana kira-kira dari yang dua itu tadi?

**47. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Bagaimana, Yang Mulia?

**48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah adanya pasal ini menghambat Saudara memperoleh tujuan untuk diangkat sebagai anggota DPRD, apakah itu?

**49. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu, ya oke.

**51. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Dalam pemerintahan (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begitu, ya. Oke, terima kasih.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Alamsyah karena ini sidang Perbaikan Permohonan hari ini juga akan dilakukan pengesahan bukti, ya. Bapak memasukkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, ya?

**54. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, bukti sudah diperiksa, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Alamsyah?

**56. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau begitu Pak Alamsyah ini Perbaikan Permohonan nanti permohonan Bapak akan kami sampaikan ke Sidang Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari 9 Hakim Konstitusi termasuk kami juga. Nanti Hakim Konstitusi yang bersembilanlah yang akan memutuskan Permohonan Bapak ini kayak biasa. Ya, kayak biasa Pak kayak permohonan-permohonan sebelumnya, ya.

**58. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Perkembangan selanjutnya Bapak akan dihubungi oleh Kepaniteraan Mahkamah. Ya, Pak Alamsyah, ya?

**60. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Dengan demikian, kalau tidak ada lagi tambahan, sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB**

Jakarta, 16 Desember 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001